

ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

*ANALYSIS OF EFFECTIVITY AND CNTRIBUTION RETRIBUTION OF THE
STASION TOWARDS OWN-SOURCE REVENUE THE REGENCY OF TALAUD*

Novia Cynthia Maradesa¹, Jenny Morasa², Lidya M. Mawikere³

^{1,2,3}*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia
E-mail: noviamaradesa75@gmail.com*

ABSTRAK

Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah dalam mendanai pembangunan di daerahnya. Kemampuan daerah untuk mencukupi semua pengeluarannya dapat dilihat dari besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD adalah retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas dan kontribusi retribusi terminal terhadap PAD dan bagaimana penerapan akuntansinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efektifitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan retribusi terminal pada tahun 2011 kurang efektif, dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan, pada tahun 2013 mengalami penurunan dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan dan berada pada kategori "sangat efektif" karena melampaui target yang telah ditentukan, namun menurun lagi pada tahun 2015. Kontribusi retribusi terminal terhadap PAD pada tahun 2011-2015 sangatlah kecil selama 5 tahun terakhir ini. Pimpinan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Kepulauan Talaud agar melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi, mengadakan sosialisasi peraturan daerah, meningkatkan pengawasan, dan lain-lain.

Kata kunci : Retribusi Terminal, Efektifitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Demanding regional autonomy autonomy regions fund local development. Region's ability to meet all the expenses can be seen from the large role of revenue (PAD). One source of revenue is retribusi area. This study aims to find out how the effectiveness and contribution of terminal charges against the PAD and how the application of accounting. This research menggunakan descriptive quantitative method. Data collection through library research and field research. The data analysis used in this research is the analysis of the effectiveness and contribution. The results showed that the effectiveness of the reception terminal charges in 2011 are less effective, and in 2012 an increase, in 2013 suffered a decline and in 2014 increased and are in the category of "highly effective" because it exceeded the predetermined targets, but declined again 2015. Kontribusi terminal charges against the PAD in the years 2011-2015 is very small during these last five years. Leadership Management Revenue and Asset Finance District Talaud Islands in order to identify and re-registration of the compulsory levy, the socialization of local regulations, improve supervision, and others.

Keywords : Retribution of Station, Effectiveness, Contribution, Region Original Income.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masa pemerintahan orde baru, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralik yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pemerintah pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya (Ruswandi, 2010). Dengan demikian, daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pemerintah pusat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara (Permana 2014 : 1)

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah diberbagai bidang, termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom terletak pada kemampuan keuangan daerah (Pamungkas 2010 : 2)

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut.

1. Pajak Daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber PAD memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan

ekonomi daerah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menetapkan retribusi daerah ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menjadi objek retribusi (Oruw 2015 : 1005). Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi. Tidak akan memperoleh jasa yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang letaknya paling utara Indonesia dan berdekatan dengan Negara tetangga Filipines. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berusaha mencari dan meningkatkan PAD melalui Retribusi Daerah. Salah sumber PAD Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu Retribusi Daerah yang memiliki kontribusi yang sangat baik dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena Retribusi Daerah bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu dari retribusi daerah tersebut adalah Retribusi Terminal. Meskipun bukan sumber penerimaan PAD yang utama namun di Kabupaten Kepulauan Talaud sendiri retribusi terminal jika di optimalkan akan memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD pada umumnya dan khususnya retribusi daerah itu sendiri. Namun melihat kenyataan yang ada retribusi terminal belum bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat. Disini pemerintah dituntut untuk lebih mengoptimalkan retribusi terminal. Karena masih kurangnya masyarakat khususnya wajib retribusi untuk membayar retribusi tersebut serta masih kurangnya paham masyarakat tentang retribusi.

Retribusi Terminal sebagai salah satu PAD yang bersumber dari masyarakat dan/atau organisasi-organisasi tertentu yang memberikan jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau yang secara langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kontribusi Retribusi Terminal terhadap Retribusi Daerah serta dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purpose activity*) (Mardiasmo 2011:2). Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diambil keputusan

mengenai alokasi sumber daya yang di optimalkan dan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Halim 2010:2). Serta pendapat lain bahwa adalah proses pencatatan, pengukuran, pengiktisaran, transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan (Darise, 2010:27)

Akuntansi Pemerintah

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas mengenai Akuntansi Pemerintah, berikut pengertian akuntansi pemerintahan menurut beberapa ahli:

1. Akuntansi pemerintah merupakan alat informasi yang baik bagi pemerintah sebagai manajemen, maupun alat informasi bagi public (Mardiasmo 2013:14).
2. Akuntansi pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara, disamping itu termasuk kesesuaiannya yang berlaku (Noerdiwan, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam PSAK no.23, mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktiva normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan adalah perbedaan antara penerimaan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu; uang yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, yang menyebabkan peningkatan dalam aktiva total; item-item seperti sewa, bunga, hadiah, dan komisi; penerimaan yang diperoleh dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa (Sumadji, Pratama dan Rosita 2010:376). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan peningkatan/pemasukan aktiva dari suatu kewajiban selama periode tertentu yang timbul dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan.

UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pengertian dalam UU No. 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Retribusi Daerah

Siahaan (2010: 5,6) menyatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (26) UU No. 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa ciri yang melekat pada Retribusi Daerah yang saat ini dipungut di Indonesia menurut Siahaan (2010: 6) adalah sebagai berikut.

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membaya retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Besarnya Retribusi Daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini.

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Retribusi Terminal

Dalam pencapaian pembangunan nasional peran transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka ditempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal.

Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek terminal adalah tempat pergantian moda atau rute (*interchange*). Terminal dapat dianggap sebagai alat pemroses terminal adalah titik, dimana suatu urutan kegiatan tertentu harus dilakukan untuk memungkinkan suatu lalu lintas (kendaraan, barang, dan sebagainya) diproses penuh sehingga dapat meneruskan perjalanan. Terminal adalah fasilitas yang sangat kompleks banyak kegiatan tertentu yang dilakukan disana, terkadang secara bersamaan secara paralel sering terjadi kemacetan yang cukup mengganggu. Terminal adalah titik pertemuan antara penumpang dan barang yang memasuki serta meninggalkan suatu sistem transportasi. Direktur Jendral Perhubungan Darat (1995) menyatakan bahwa terminal angkutan umum merupakan titik simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana angkutan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, berupa tempat kendaraan umum menaikkan atau menurunkan penumpang atau barang, bongkar muat barang, sebagai tempat berpindahnya penumpang baik intra maupun antar moda transportasi yang terjadi sebagai akibat adanya arus pergerakan manusia dan barang serta adanya tuntutan efisiensi transportasi.

Teori Efektivitas

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Halim 2010:47). Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat.

Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, apabila pekerjaan tersebut dengan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektifitas yang terkait dengan retribusi maupun perpajakan menurut simanjundak dikutip dari Halim (2010:48)

adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dan potensi retribusi dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{R}{T} \times \frac{R}{R} \times \frac{D}{D} \times h \times 100\%$$

Halim (2010:49) menyatakan efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Halim (2010:49)

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi terminal memeberikan sumbangan dalam PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Retribusi daerah (khususnya retribusi terminal) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi terminal terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peran retribusi terminal terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

Landasan Empirik

Antoneta Sembel (2013) dengan judul : Analisi Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini melihat kontribusi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menganalisis jumlah PAD Kabupaten Minahasa Selatan sepanjang tahun 2008-2011. Dengan hasil penelitiannya yaitu : Hasil perhitungan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, dapat diketahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2008-2011 yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2009 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 36,21% dari tahun 2008 dan pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 17,95%. Namun pada tahun 2011 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu naik 40,53% dari tahun 2010 dan Hasil perhitungan penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2008-2011 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 realisasi Pajak Daerah naik 10,98% tahun 2008 dan pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 13,97% dan naik kembali pada tahun 2011 menjadi 47,29% dari realisasi tahun 2010.

2. METODE PENELITIAN

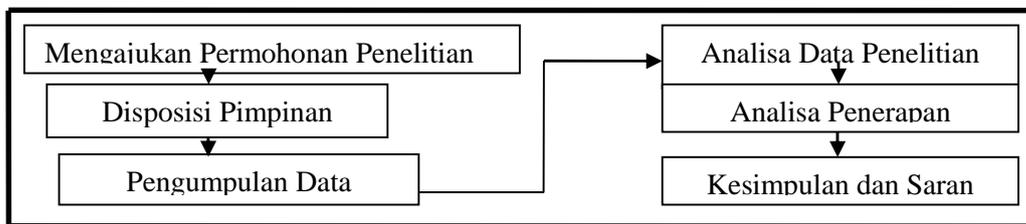
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi Retribusi Terminal dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud adalah jenis penelitian Deskriptif (Suratiyono: 2013). Dalam penelitian ini juga digunakan penelitian kualitatif, berupa gambaran umum tempat penelitian serta instansi tempat dimana dilakukan penelitian, dan wawancara lapangan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (DPPKAD). Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yang meliputi kegiatan pengumpulan data dan literatur, pengolahan data, analisis data, hingga penulisan laporan dalam bentuk skripsi.

Prosedur Penelitian



Sumber Data: Olahan Pribad

Gambar 1. Prosdur Penelitian

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio

1. Analisis Efektivitas

Besarnya peningkatan efektivitas retribusi pasar dihitung dengan rumus

$$\frac{R}{T} \frac{P_t}{P_t} \frac{R}{R} \frac{T}{T} \times 1$$

2. Analsis Kontribusi

$$\frac{R}{R} \frac{P_t}{P_t} \frac{R}{R} \frac{T}{D} \frac{1}{P} \times 1$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Target dan Realisasi Retribusi Terminal Kabupaten Kepulauan Talaud

Tabel 2. Target dan Realisasi Retribusi Terminal, Realisasi Retribusi Daerah dan Realisasi PAD T.A 2011-2015

Tahun	Retribusi Terminal (Rp)		Retribusi Daerah (Rp)	PAD (Rp)
	Target	Realisasi		
2011	95.006.000,00	41.461.000,00	685.654.000,00	7.642.819.166,00
2012	10.032.000,00	6.832.000,00	2.456.653.707,00	6.168.158.000,00
2013	22.110.250,00	3.486.000,00	4.914.623.000,00	12.710.664.267,00
2014	3.916.800,00	4.068.000,00	7.766.678.899,00	21.936.298.450,00
2015	5.350.000,00	3.510.000,00	6.554.365.500,00	23.185.953.125,00
Total	136.415.050	59.357.000,00	22.377.975.106,00	71.643.893.008,00

Sumber : Dinas PPKAD, data diolah tahun 2016

Efektifitas Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Kepulauan Talaud

Tabel 3. Efektifitas Penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Retribusi Terminal (Rp)	Presentase (%) Efektivitas
2011	95.006.000,00	41.461.000,00	-	43,64 %
2012	10.032.000,00	6.832.000,00	Turun 34.629.000,00	68,10 %
2013	22.110.250,00	3.486.000,00	Turun 3.346.000,00	15,77 %
2014	3.916.800,00	4.068.000,00	Naik 582.000,00	103,86 %
2015	5.350.000,00	3.510.000,00	Turun 558.000,00	65,61 %
Total	136.415.050	59.357.000,00	39.115.000,00	296,98%

Sumber : Dinas PPKAD, data diolah tahun 2016

Pembahasan

Kontribusi Penerimaan Retribusi Terminal terhadap Retribusi Daerah

Tabel 4. Kontribusi Penerimaan Retribusi Terminal terhadap Retribusi daerah T.A 2011-2015

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Penerimaan Retribusi Terminal (Rp)	Kontribusi (%)
2011	685.654.000,00	41.461.000,00	6,05
2012	2.456.653.707,00	6.832.000,00	0,27
2013	4.914.623.000,00	3.486.000,00	0,07
2014	7.766.678.899,00	4.068.000,00	0,05
2015	6.554.365.500,00	3.510.000,00	0,05
Total	22.377.975.106,00	59.357.000,00	0,06

Sumber : Data, hasil olahan pribadi, 2016

Kontribusi Penerimaan Retribusi Terminal terhadap PAD

Tabel 5 Kontribusi Penerimaan Retribusi Terminal terhadap PAD T.A 2011-2015

Tahun	PAD (Rp)	Penerimaan Retribusi Terminal (Rp)	Kontribusi
2011	7.642.819.166,00	41.461.000,00	0,05%
2012	6.168.158.000,00	6.832.000,00	0,001%
2013	12.710.664.267,00	3.486.000,00	0,03%
2014	21.936.298.450,00	4.068.000,00	0,02%
2015	23.185.953.125,00	3.510.000,00	0,02%
Total	71.643.893.008,00	59.357.000,00	0.121%

Sumber : Data, hasil olahan pribadi, 2016

Analisis Efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten Kepulauan Talaud

Tabel 6. Analisis Efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2011-2015

Tahun	Presentase Efektifitas	Kriteria Efektifitas
2011	43,64 %	Kurang Efektif
2012	68,10 %	Kurang Efektif
2013	15,77 %	Kurang Efektif
2014	103,86 %	Sangat Efektif
2015	65,61 %	Kurang Efektif

Sumber : Data, hasil olahan pribadi, 2016

Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah

Tabel 7. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah

Tahun	Presentase Kontribusi (%)	Keterangan
2011	6,05	Sangat Kurang
2012	0,27	Sangat Kurang
2013	0,07	Sangat Kurang
2014	0,05	Sangat Kurang
2015	0,05	Sangat Kurang

Sumber : Data, hasil olahan pribadi, 2016

Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD

Tabel 8 Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD

Tahun Anggaran	Presentase Kontribusi (%)	Keterangan
2011	0,05	Sangat Kurang
2012	0,001	Sangat Kurang
2013	0,03	Sangat Kurang
2014	0,02	Sangat Kurang
2015	0,02	Sangat Kurang

Sumber : Data, hasil olahan pribadi, 2016

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Efektifitas penerimaan Retribusi Terminal pada tahun 2011 belum mencapai target dengan presentase 43,64%, dan kemudian naik pada tahun 2012 yaitu dengan presentase 68,10%, dan pada 2013 mengalami penurunan yang signifikan dengan presentasinya

- 15,77%, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan dan berada pada kategori “sangat efektif” ini dikarenakan penerimaan retribusi terminal melampaui target yang telah ditetapkan yaitu mencapai presentase sebesar 103,86% meningkat sebesar 88,09% dari presentase tahun sebelumnya, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan dengan presentase 65,61%. Maka, dapat dikatakan bahwa tingkat efektifitas penerimaan retribusi terminal pada tahun 2011-2013 dan 2015 masih belum efektif sedangkan pada tahun 2014 sudah sangat efektif karena telah mencapai presentase lebih dari 100%.
2. Penerimaan retribusi terminal sudah memberkan kontribusi, namun kontribusinya sangat kurang/kecil terhadap retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2011-2015. Untuk kontribusi tahun 2011 hanya sebesar 6,05%, dan mengalami penurunan ditahun 2012 dengan presentase 0,27%, dan kembali menurun pada tahun 2013 dengan jumlah presentase hanya sebesar 0,07%. Dan menurun lagi pada tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu sebesar 2% dengan presentase yang sama ditahun berbeda yaitu 0,05%. Kemudian untuk kontribusi retribusi terminal terhadap PAD pada tahun 2011-2015 sangatlah kecil selama 5 tahun terakhir ini hanya berkisar pada angka presentase 0,04%. Dari tahun ke tahun kontribusi retribusi terminal terhadap PAD mengalami penurunan terus menerus, walaupun kontribusi retribusi terminal masih sangat kecil terhadap PAD akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.
 3. Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), menggunakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sistem penerapan akuntansi yang digunakan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Sistem Penerapan Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Saran

1. Pimpinan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan, melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga didapat data yang akurat serta memudahkan untuk mengidentifikasi proporsi retribusi daerah.
2. Pimpinan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud harus mengatur dan merevisi kembali strategi-strategi yang menunjang penerimaan retribusi terminal, dan membuat inovasi baru dan gebrakan untuk mengoptimalkan potensi retribusi terminal yang ada dalam menunjang PAD.
3. Pimpinan daerah mengadakan sosialisasi Perda yang baru sehingga wajib retribusi mengerti hak dan kewajiban.
4. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan retribusi terminal, meningkatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dengan mengadakan penyuluhan. Dan perlu dilakukannya perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu, mengingat retribusi terminal bisa dapat berkembang seiring perkembangan perekonomian.
5. Pimpinan daerah lebih memperhatikan fasilitas yang ada. Perlu adanya pembangunan fasilitas yang wajib untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika seperti Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, pos-pos pengawasan LLAJ, pos pengawasan angkutan laut, khususnya pembangunan Terminal Angkutan Darat serta fasilitas-fasilitas yang ada didalamnya yang prespektif di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan maupun di kota-kota strategis yang menjadi pusat perdagangan.
6. Perlu adanya penambahan alokasi dana untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan retribusi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam jurnal

- [1] Ruswandi, Arif, 2010. *Tingkat Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, Jawa Timur*. Diakses, Maret, 8, 2016

Buku

- [2] Darise, Nurlan, 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi II, PT Indeks, Jakarta.
- [3] Halim, Abdul, 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga Salemba Empat, Jakarta
- [4] Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Dua. UPP STIM. YKPN, Yogyakarta
- [5] Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- [6] Noerdiawan D, Iswahyudi, Maulidah, 2010. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta

Artikel dari internet:

- [7] Oruw, Ester, 2015. *Evaluasi Sistem Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Kaimana Papua Barat Tahun 2013-2014*. <http://download.portalgaruda.org/article>. Diakses, Februari, 7, 2016
- [8] Pamungkas, Heru, 2008. *Analisi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006)*. <http://download.jurnal.ekonomi.org/article>. Diakses, Februari, 14, 2016.
- [9] Permana, Indra, Ardana, 2014. *Analisi Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang*. <http://download.jurnalemba.org/article>. Diakses, Februari, 7, 2016